

PANDANGAN-PANDANGAN SEMENTARA MENGENAI PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM REPELITA VII

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

**Disampaikan pada Rakernas & Rapimnas KADIN
Jakarta, 20 Desember 1996**

Pendahuluan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Saya diminta untuk ikut memberikan masukan pada RAKERNAS dan RAPIMNAS KADIN 1997 dalam upayanya merumuskan Program Kerja 1997. Topik yang diberikan kepada saya adalah mengenai pembangunan ekonomi dalam Repelita VII.

Dalam tahun anggaran 1996/97 ini kita sudah memasuki paruh-waktu pelaksanaan Repelita VI. Kami di Bappenas dan instansi-instansi pemerintah lainnya sedang menyusun kaji ulang pelaksanaan Repelita VI yang kita butuhkan untuk mempersiapkan penyusunan Repelita VII. Kita ketahui bahwa Repelita VII itu sendiri baru akan disusun berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 nanti. Yang sekarang dapat dilakukan adalah menghimpun bahan-bahannya dan membuat perkiraan-perkiraan semata-mata atas dasar pengalaman yang kita miliki sekarang, dan sasaran-sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Repelita VI untuk PJP II.

Oleh karena itu, apa yang akan saya kemukakan ini sifatnya masih berupa pandangan-pandangan sementara, yang sangat bersifat garis besar, sebagian dapat dikuantifikasikan, tetapi sebagian besar masih bersifat kualitatif bahkan kedengarannya masih sangat normatif. Akan tetapi, memang tidak mungkin kita berbuat lebih dari itu, tanpa menyalahi ketentuan konstitusi bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan ditetapkan sendiri oleh rakyat, dan dituangkan dalam GBHN, dan untuk Repelita VII adalah GBHN 1998.

Selanjutnya, secara ringkas akan saya bahas kembali berbagai tantangan atau isu strategis dalam upaya untuk mewujudkan berbagai visi tersebut. Saya katakan "bahas kembali", karena dalam berbagai kesempatan saya telah sering mengungkapkannya dengan berbagai format. Bagian akhir uraian saya adalah apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Pembangunan Ekonomi Dalam Repelita VII

Pandangan-pandangan kita mengenai Repelita VII harus diletakkan dalam kerangka wawasan masa depan kita, sebagai bagian perjalanan panjang pembangunan bangsa seperti yang terkandung dalam rencana PJP II karena memang demikianlah sistem pembangunan nasional kita. Wawasan PJP II itu terkandung dalam GBHN 1993. Kata-kata kunci dalam PJP II adalah kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan harus tumbuh dan berkembang cepat dengan makin mengandalkan pada kemampuan sendiri. Perlu digaris-bawahi bahwa peningkatan kesejahteraan yang terjadi harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, sebagai perwujudan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu pula, maka titik berat pembangunan pada Repelita VII adalah di bidang ekonomi, seiring dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sesuai dengan peran masyarakat, terutama dunia usahanya, dalam perekonomian yang makin besar, kehendak untuk menciptakan kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan itu akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha. Dalam hal ini kewajiban pemerintah adalah terutama mengembangkan iklim dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mendukung aktivitas dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Dalam kerangka seperti itulah, disusun beberapa gambaran pokok Repelita VII.

Pertama, kemajuan pembangunan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang jauh melampaui pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen dan pertambahan penduduk di bawah 1,5 persen per tahun. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sangat cepat tersebut menciptakan peluang pasar yang sangat besar. Selain itu, peluang ekspor juga akan makin besar dengan berkurangnya hambatan-hambatan ekspor. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai hasil program-program pendidikan dan kesehatan, penguasaan teknologi dan informasi, juga akan meningkatkan daya saing ekspor. Baik pasar dalam negeri maupun luar negeri yang makin luas ini akan menjadi pendorong peningkatan produksi dalam negeri. Pada saat itu ekonomi Indonesia telah dapat digolongkan ke dalam negara industri baru.

Untuk mendukung kegiatan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana ekonomi, yang berupa listrik, jalan, telepon, air, dan pelabuhan akan ditingkatkan. Peran swasta dalam penyediaan prasarana akan makin besar terutama di daerah-daerah yang kelayakan ekonominya memungkinkan investasi swasta. Dengan peningkatan kebutuhan akan prasarana yang makin besar dan dengan penerapan teknologi maju, pembangunan prasarana oleh pihak swasta menjadi lebih menarik dan makin layak secara ekonomi, sehingga dapat mencakup bidang prasarana dan wilayah yang makin luas. Pembangunan prasarana oleh pemerintah akan makin diarahkan untuk mengembangkan potensi wilayah dan masyarakat tertinggal, serta mengembangkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kedua, stabilitas ekonomi makro diharapkan akan makin mantap. Tata niaga sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pasar dan bersifat transparan sehingga ketersediaan bahan-bahan strategis dan harganya di dalam negeri sudah makin stabil. Dengan demikian laju inflasi akan lebih terkendali, nilai tukar mata uang makin mantap, dan tingkat suku bunga secara bertahap akan turun. Dengan makin kokohnya dasar-dasar ekonomi kita, arus masuk modal luar negeri menjadi stabil dan mantap pula. Defisit dalam neraca transaksi berjalan makin terkendali, antara lain juga karena ekspor yang akan meningkat serta pola impor yang makin terarah pada sektor-sektor produktif.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi akan diiringi oleh proses transformasi yang ditandai dengan makin besarnya peran sektor industri dalam struktur produksi. Sektor pertanian, meskipun perannya menurun, produktivitasnya akan meningkat, karena pemanfaatan lahan secara lebih baik, lebih teratur, dan terarah, serta penerapan teknologi sehingga pertanian akan ditangani secara industrial. Kegiatan ekonomi informal dan tradisional akan makin berkembang menjadi sektor formal dan modern. Proses ini akan membuat struktur ekonomi Indonesia menjadi tumbuh kukuh, makin handal, dan mandiri.

Perubahan struktur perekonomian ini berjalan seiring dengan perubahan struktur ketenagakerjaan. Makin banyak tenaga kerja yang akan terserap di sektor industri dan jasa. Pada akhir Repelita VII, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian diharapkan turun menjadi sekitar 39,6 persen dari 43,4 persen pada tahun 1995, sedangkan sisanya bekerja di luar sektor pertanian. Sejalan dengan perkembangan tersebut, peran tenaga profesional, teknisi, dan ketatalaksanaan akan meningkat. Begitu pula jumlah tenaga kerja dengan upah tetap akan meningkat.

Keempat, proses transformasi itu diharapkan akan mendorong terbentuknya kelas menengah yang makin kuat, yang akan berkembang menjadi tulang punggung perekonomian yang

andal. Kelas menengah ini berintikan tenaga kerja profesional dan pengusaha menengah yang mandiri. Hal ini berkaitan dengan berkembangnya lapisan pengusaha menengah dan kecil yang makin kuat dan tangguh dalam persaingan. Konsentrasi kekuatan pasar makin berkurang sehingga tercipta keseimbangan yang lebih baik antara usaha besar, menengah, dan kecil, dan dengan demikian lebih memperkuat lagi struktur perekonomian kita.

Kelima, masalah kemiskinan absolut, berdasarkan kriteria yang kita gunakan, diharapkan sudah teratasi pada akhir Repelita VII. Mungkin masih ada yang tersisa, yakni mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan yang harus diupayakan secara tuntas teratasi sebelum PJP II berakhir.

Keenam, kesenjangan antardaerah secara sistematis dan konsisten akan diusahakan terus berkurang. Kawasan tertinggal akan memperoleh perhatian khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap ketertinggalannya. Peran kawasan timur Indonesia dalam perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan perkembangannya.

Demikianlah, gambaran singkat pembangunan ekonomi dalam Repelita VII. Apa yang kita harapkan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus sungguh-sungguh diperjuangkan sedangkan tantangannya tidak sedikit. Keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan meningkat kesejahteraannya dalam Repelita VII itu harus dijabarkan dalam rencana yang matang. Kesungguhan dalam perjuangan sangat penting, seperti halnya keberhasilan pembangunan ekonomi yang sekarang kita nikmati, yang merupakan buah dari kesungguhan perjuangan dalam pembangunan yang berencana selama tiga puluh tahun yang telah kita lalui.

Perencanaan pembangunan nasional jelas menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, pihak swasta pun sejak sekarang sudah harus mengantisipasinya dan membuat rencananya sendiri, baik rencana korporat masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan, maupun dari asosiasi-asosiasi usaha sejenis, serta juga dari organisasi dunia usaha seperti KADIN, baik di pusat maupun di daerah.

Saya tidak akan menggunakan istilah “*Indonesia Inc.*”, tetapi memang antara kebijaksanaan pemerintah dan langkah dunia usaha perlu ada keterpaduan, dan harus saling mengisi. Kita menghadapi berbagai tantangan yang tidak kecil yang hanya dapat diatasi dengan mengarahkan secara efektif seluruh potensi dan sumber daya yang ada pada kita. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Beberapa isu strategis

Pertama, dalam Repelita VII mendatang, Indonesia akan memasuki abad ke-21 saat globalisasi dan proses perubahan akan berlangsung sangat cepat.

Kurun waktu Repelita VII akan bersamaan dengan diberlakukannya kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2003. Ekonomi Indonesia akan makin terintegrasi dengan ekonomi ASEAN dan Asia Pasifik. Dengan ditiadakannya perlindungan oleh setiap negara, persaingan dalam kawasan ini akan makin keras. Untuk itu, efisiensi ekonomi dan produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan. Terlebih lagi karena persaingan yang akan terjadi terutama lebih banyak antarunit usaha, baik usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil, daripada antarnegara.

Dalam rangka ini deregulasi dan debirokratisasi harus dilanjutkan, tetapi harus disertai dengan perbaikan dalam struktur, mental, dan kesejahteraan aparat birokrasi.

Kedua, terkait dengan proses globalisasi dalam pasar modal internasional, arus dana di negara-negara maju yang sebelumnya hanya berputar-putar di antara negara-negara maju, kini telah mengalir deras ke negara berkembang termasuk negara kita, sebagai bagian wilayah dunia

yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat (*emerging market*). Dalam Repelita VII, arus dana tersebut diperkirakan masih tetap tinggi. Derasnya aliran masuk modal internasional, baik melalui perbankan maupun pasar modal domestik, akan menjadi tantangan bagi kita dalam mengendalikan inflasi, dan menjaga dasar-dasar (*fundamentals*) ekonomi kita. Arus masuk modal tersebut memang sangat bermanfaat. Namun, apabila dasar-dasar ekonomi kita tidak sehat, maka dana tersebut dapat pula lari ke luar secara besar-besaran dan serentak. Hal ini akan menggoncangkan stabilitas moneter dan neraca pembayaran kita.

Ketiga, memelihara dan memantapkan swasembada pangan, juga bukan tantangan yang kecil, karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, dan terus bertambah, meskipun persentase pertumbuhannya mengecil. Salah satu masalah adalah berkurangnya lahan pertanian akibat digunakan untuk keperluan lain, seperti industri dan perumahan, yang meningkat sekali kebutuhannya karena pertumbuhan ekonomi yang pesat. Maka upaya mempertahankan lahan-lahan pertanian yang ada, dan meningkatkan produktivitasnya, merupakan suatu tantangan yang besar pula dalam memasuki abad ke-21.

Keempat, keterbatasan lahan berkait erat dengan masalah lingkungan, yang juga membatasi kegiatan banyak sektor ekonomi seperti industri, pertambangan, pertanian, atau perkebunan. Sumber daya air yang terbatas, serta udara yang makin terpolusi menjadi masalah dalam pembangunan kita di masa depan. Oleh karena itu, dampak terhadap lingkungan harus sudah diperhitungkan sebagai biaya dalam setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan, sehingga lingkungan tidak dianggap semata-mata sebagai sesuatu yang gratis saja.

Masalah keterbatasan sumber daya ini mencerminkan pula ketidakmerataan pembangunan antardaerah karena daerah yang padat penduduknya terbatas sumber daya alamnya, sedangkan daerah yang banyak potensi sumber daya alamnya, terbatas penduduknya. Terbatas bukan hanya dalam jumlah, tetapi kualitasnya.

Kelima, berkaitan dengan itu maka sumber daya manusia menjadi isu yang paling strategis. Dewasa ini berbagai ukuran (*Human Development Index/HDI*, *Physical Quality of Life Index/ PQLI*, dan sebagainya) menunjukkan bahwa dalam hal kualitas sumber daya manusia kita jauh tertinggal. Refleksinya ada pada produktivitas. Selain itu, jumlah penganggur masih cukup besar, terutama penganggur berpendidikan yang ternyata bertambah besar. Selagi sarjana kita banyak yang menganggur, impor jasa berupa tenaga ahli asing ternyata juga besar. Berarti sebetulnya, bukan lapangan kerjanya yang tidak ada, atau tidak tercipta oleh pembangunan, melainkan tenaga-tenaga terdidik kita tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja itu (meskipun ada juga karena terkait persyaratan dengan investor asing yang hanya percaya pada orangnya sendiri).

Oleh karena itu, upaya mengarahkan sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan pasar kerja, sangatlah strategis bagi pembangunan yang berkesinambungan.

Keenam, terkait dengan kualitas SDM dan produktivitas, adalah penguasaan teknologi. Sebagian ekspor hasil industri kita teknologinya masih rendah atau sudah mulai usang. Banyak industri yang bobot pemakaian sumber daya alam dan daya rusak lingkungannya besar. Juga banyak industri yang masih mengandalkan pada upah buruh yang rendah, yang berarti nilai tambahnya juga rendah. Salah satu sebabnya adalah belum terangkainya industri hulu dengan industri hilir. Di satu pihak kita banyak memiliki industri hulu, seperti dalam industri pertambangan dan perkebunan, tanpa disertai industri hilir, dan di lain pihak banyak industri hilir, yang sangat tergantung pada industri hulu di luar negeri.

Pendalaman dan pemantapan industri serta penguasaan dan penerapan teknologi yang tepat yang dapat memperkuat dan menganekaragamkan produk-produk nasional, dan yang dapat menghasilkan daya saing merupakan upaya yang amat strategis.

Upaya yang harus dilakukan

Pertama-tama mengenai peran pemerintah. Seperti diketahui, peran pemerintah secara langsung sebagai pelaku kegiatan ekonomi sangat dominan pada awal pembangunan Orde Baru. Sejalan dengan kemajuan pembangunan yang menghasilkan peningkatan kemampuan masyarakat, terutama dunia usaha, peran pemerintah makin berkurang.

Dalam Repelita VII nanti, anggaran pemerintah akan lebih dicurahkan pada pembangunan prasarana yang mendukung investasi swasta dan penyediaan sarana umum yang tidak ekonomis apabila dilakukan oleh swasta, tetapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di samping pengembangan program-program pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang dalam kondisinya sekarang ini tidak mampu mengikuti gerak maju dari pembangunan nasional.

Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pengembangan usaha adalah tanggung jawab pemerintah. Sasaran itu dapat dicapai apabila kondisi makroekonomi stabil dan mendorong meningkatnya penanaman modal. Dari sisi penawaran, kondisi ekonomi yang stabil dalam Repelita VII harus diupayakan antara lain melalui penyediaan pangan, sandang, dan kebutuhan pokok lain dalam masyarakat secara memadai.

Iklim penanaman modal yang sehat dan dinamis perlu diperkuat dengan penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur perizinan, serta dengan meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan peraturan di pusat dan daerah. Di samping itu, keselarasan rencana pembangunan prasarana dengan perencanaan penanaman modal harus makin terjalin.

Peningkatan kualitas SDM masih tetap harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu pendidikan tetap menjadi program terpenting dalam setiap upaya pembangunan. Kita akan melanjutkan program pendidikan dasar 9 tahun, tetapi juga memberi perhatian lebih besar pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan ketrampilan. Di tingkat perguruan tinggi program-program politeknik harus diperbanyak. Pendidikan tinggi pada umumnya harus semakin diarahkan untuk mengisi kebutuhan pembangunan dan bukan semata-mata mencetak lulusan. Dalam rangka pendidikan, pengembangan budaya masyarakat agar siap menjadi bangsa Indonesia yang modern perlu mendapat perhatian, seperti etos kerja, disiplin, ketaatan pada waktu dan aturan dan sebagainya.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan dan derajat gizi masyarakat perlu terus ditingkatkan karena besar pengaruhnya pada produktivitas. Investasi di sini harus pula diberi prioritas, meskipun tampaknya dampak hasilnya berjangka sangat panjang.

Dalam hal SDM ini, SDM pemerintah perlu pula diusahakan meningkat kualitasnya, baik profesionalisme maupun kejujurannya, dan dengan sendirinya kesejahteraannya. Dengan cara itu maka hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha menjadi hilang dan aparat pemerintah betul-betul dapat diandalkan untuk menunjang dan bukan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka SDM pula, kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan pengembangan teknologi pada umumnya, pemerintah masih harus berperan. Akan tetapi perannya harus pada memelopori, seperti untuk penelitian-penelitian dasar, dan mendukung kegiatan litbang, dan pengembangan teknologi oleh dunia usaha. Jadi, sifatnya *tutwuri handayani*. Pemerintah menciptakan iklim dan insentif, jika diperlukan, untuk merangsang kegiatan litbang dan teknologi oleh dunia usaha. Dunia usahalah yang pada akhirnya harus menjadi tulang punggung perkembangan litbang dan teknologi di Indonesia.

Sekarang kita memasuki upaya yang kita harapkan dari dunia usaha. Jelas bahwa tanggung jawab pembangunan akan makin besar dipikul oleh dunia usaha. Hal itu tidak bisa lagi dihindari.

Maka, kita mengharapkan dunia usaha kita dapat turut menjawab berbagai tantangan di atas, dapat meningkatkan daya saing, dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dapat terus menerobos pasar-pasar dunia sambil mempertahankan pasar dalam negeri. Perlu saya tekankan bahwa bertahan di pasar dalam negeri, bukan dengan proteksi, melainkan dengan kekuatan persaingan. Kalau di negara sendiri saja tidak bisa bersaing, apalagi di tempat lain.

Dunia usaha kita harapkan juga berorientasi untuk membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Otomatisasi memang acapkali tidak bisa dihambat, tetapi harus diartikan bukan sebagai pengurangan kesempatan kerja. Sebaliknya otomatisasi harus dilihat sebagai penambahan kesempatan kerja yang makin tinggi kualitasnya.

Untuk itu dunia usaha diharapkan turut serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita.

Dunia usaha, harus kuat tatanannya. Oleh karena itu, dunia usaha kita tulang punggungnya harus lapisan usaha menengah yang kukuh. Membangun lapisan usaha menengah harus menjadi misi kita bersama, yaitu misi pemerintah dan dunia usaha. Lapisan usaha menengah yang kuat dengan sendirinya akan saling mendukung dengan lapisan usaha kecil yang menjadi sumbernya, dan dengan lapisan usaha besar, yang harus makin luas basisnya. Artinya usaha besar jangan hanya terbatas, tetapi harus bersumber makin luas, yakni dari lapisan usaha menengah, yang berhasil menerobos ke atas, baik karena keberhasilan meningkatkan kegiatan usahanya sendiri, maupun karena bergabung bersama-sama usaha menengah lainnya.

Kata kunci adalah kemitraan. Saya sudah banyak berbicara mengenai kemitraan. Kita harus mengembangkan kemitraan yang didasari oleh sikap saling percaya, keikhlasan, dan kegiatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan ini harus menjadi perekatnya struktur dunia usaha kita. Dalam tatanan demikian, dengan sendirinya kecenderungan monopoli dan monopsoni akan menjadi berkurang dan akhirnya menjadi tidak ada.

Kita juga mengharapkan dunia usaha untuk jangan hanya berkonsentrasi di satu daerah atau bidang kegiatan tertentu saja, tetapi terus-menerus mencari peluang untuk mengembangkan daerah-daerah dan bidang-bidang kegiatan lain. Terutama adalah kawasan-kawasan yang masih tertinggal, seperti Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang memerlukan investasi swasta untuk dapat mempercepat pertumbuhannya dan agar pertumbuhan itu berbasis kuat dan berkesinambungan. Pemerintah sendiri saja tidak mungkin dapat mengatasi masalah kesenjangan antardaerah itu.

Saya yakin perjuangan membangun bangsa yang maju dan mandiri, yang berarti pula pembangunan secara serempak diseluruh tanah air dapat kita lakukan sebagai usaha bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, selain wawasan keuntungan, yang wajar dimiliki oleh para pengusaha, perlu pula pengusaha kita memiliki idealisme, memiliki wawasan kebangsaan.

Oleh karena itu pula dunia usaha kita, harus “berbudaya”. Yang membedakan satu peradaban dengan peradaban lainnya adalah kebudayaannya. Janganlah pengusaha kita menjadi “*economic animal*” yang saling memangsa lainnya, dan tidak peduli kecuali kepada kepentingan sendiri. Sungguh penting bagi kita mengembangkan etika bisnis, karena bisnis juga harus bermoral, dan moral adalah bagian dari kebudayaan. Ada sisi lain dalam kehidupan ini yang tidak kalah pentingnya dibanding keuntungan. Janganlah tujuan menghalalkan cara. Kepentingan kita masing-masing harus diletakkan pula pada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jangan lupa, betapa pun sukses yang telah dicapai, betapa pun modal dan kekayaan telah terakumulasikan, kita semua hidup dalam masyarakat dan bangsa yang sama, yaitu masyarakat dan bangsa Indonesia. Masyarakat dan bangsa Indonesia ini memiliki falsafah hidup, yaitu Pancasila yang pengamalannya berinti pada pengendalian diri.

Penutup

Demikianlah sekedar bahan pembahasan dari saya. Saya harapkan ada manfaatnya bagi Saudara-saudara. Saya akan sangat gembira apabila pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan tadi dapat dipelajari, dikembangkan, dan disempurnakan. Mungkin bisa bermanfaat juga bagi pemerintah sebagai umpan balik pada waktu kita nanti sungguh-sungguh menyusun Repelita VII.

Selamat bekerja.